

## KESADARAN MULTIKULTURAL SEBAGAI RANAH KURIKULUM PENDIDIKAN

Idi Warsah

Program Studi Psikologi Pendidikan STAIN Curup-Bengkulu, Indonesia  
Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara,  
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119  
Email: idiwarsah@gmail.com

DOI: 10.29313/tjpi.v6i2.2845

Accepted: Agust 15th, 2017. Approved: January 18th, 2018. Published: January 18th, 2018

### ABSTRACT

*This study aims to find the relation between educational curriculum goals and the reality of a pluralistic Indonesian society. Through a character-based education curriculum that is being spurred on the implementation of the school is expected to provide learning of the importance of respecting the differences of religion, ethnicity, tribe, and race, because it is sunnatullah. This study uses a normative psychological approach and refers to the actual source of issues related to the multicultural issues and ideas of the educational curriculum. The conclusions obtained are; a curriculum in which paradigm is multiculturalism (whatever the name) becomes important because education is a nursery awareness multiculturalism. This awareness cannot be simply talked about but must be put into practice. Through education is expected to deliver the nation's children realize that the difference is a god grace and can develop the competence to perceive, evaluate, believe, and perform more dignified actions within the framework of multicultural education.*

**Keywords:** *Multicultural Awareness, Education Curriculum.*

### ABSTRAK

*Studi ini bertujuan menemukan relasi antara tujuan kurikulum pendidikan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Melalui kurikulum pendidikan berbasis karakter yang sedang dipacu pelaksanaannya pada pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pembelajaran akan pentingnya menghargai perbedaan agama, etnis, suku dan ras, karena itu adalah sunnatullah. Studi ini menggunakan pendekatan normatif psikologis dan merujuk kepada sumber tekstual yang berkaitan dengan isu multikultural dan gagasan kurikulum pendidikan. Kesimpulan yang diperoleh adalah Sebuah kurikulum berparadigma multikulturalisme (apapun namanya) menjadi penting, karena pendidikan merupakan ladang persemaian kesadaran multikulturalisme. Kesadaran ini tidak dapat hanya sekedar dibicarakan tetapi harus dipraktikkan. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghantarkan anak bangsa menyadari bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan dan dapat mengembangkan kompetensi untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan yang lebih bermartabat dalam bingkai pendidikan multikultural.*

**Kata Kunci:** *Kesadaran Multikultural, Kurikulum Pendidikan.*

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk Negara maritim terbesar di belahan dunia, karena terdiri dari tidak kurang dari 13,000 pulau. Dengan kondisi geografis tersebut, berkembang ragam budaya, bahasa, etnis, ras dan bahkan agama atau yang sering di sebut Negara yang multikultural. Istilah multikulturalisme merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi para intelektual dan kaum terdidik di negeri ini. Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. (Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.). 2002 dan Agus M. Najib dkk)

Sebenarnya, terdapat tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut - baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda - yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya “ketidaktunggalan”. “Konsep pluralitas mengandaikan adanya” hal-hal yang “lebih dari satu” (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru.

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru

terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya (Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.) 2002).

Zuhairi Miswari (2010: 193) mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan salah satu paham yang memberikan perhatian terhadap kelompok minoritas, terutama dalam rangka melindungi terhadap kelompok etnis sehingga mereka dapat mempertahankan identitas. Dalam bahasa yang sederhana, multikulturalisme adalah nasionalisme untuk minoritas (*nationalism of the minorities*). Multikulturalisme telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap minoritas. Selama ini, konsep tentang kebenaran hanya didasarkan pada paham keagamaan. Multikulturalisme menjadi sebuah alternatif untuk melihat identitas sebuah komunitas bukan dan latar keagamaannya, melainkan dan latar kebudayaannya.

Lebih lanjut Zuhairi (2010) mengemukakan pentingnya multikulturalisme bagi studi keislaman, menurutnya paham ini secara nyata telah menghidupkan kembali sebuah kaidah lama yang sudah akrab digunakan oleh para ulama fikih, yaitu sesuatu yang dinilai benar oleh adat, maka juga dibenarkan oleh teks (*al-ta'yin bi al-'urf ka al-ta'yin bi al-nashb*).<sup>4</sup> Para ulama sudah sejak lama menganggap bahwa tradisi dan kebudayaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, sebagaimana teks dijadikan sebagai sumber primer. Gagasan besar tentang multikulturalisme dalam berbagai dimensi kehidupan merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan agar terjadi perubahan

dari paradigma tradisi yang eksklusif dan fanatisme sempit pada setiap anak bangsa.

Berbicara tentang perubahan, dapat terjadi setiap saat dan ia merupakan proses yang dinamis serta tidak dapat dielakkan. Berubah berarti beranjak dari keadaan yang semula menuju keadaan yang lain, baik itu bersifat positif maupun negatif. Tanpa berubah tidak ada pertumbuhan dan tidak ada dorongan. Namun dengan berubah terjadi ketakutan, kebingungan dan kegagalan dan kegembiraan. Setiap orang dapat memberikan perubahan pada orang lain baik bersifat implisit dan eksplisit.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki penduduk kurang lebih 206 juta dan lebih dari 1000 etnis dan sub kelompok etnis, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu negara yang paling beragam etnis dan budaya di dunia". Sehingga, semboyan bangsa Indonesia "Bhineka Tunggal Ika" cukup memberikan gambaran kepada siapapun akan pluralismenya bangsa ini.

Pada tahun 1979, di kota Vatikan Roma, diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap, Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paus Paulus II pun mengatakan "Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama namun hidup dalam kerukunan dan keramahmatan (Amirullah Syarbini, 2007: 51).

Kemajemukan bangsa ini, disatu sisi merupakan aset kekayaan *khasanah* budaya bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi potensi konflik tatkala tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak memiliki sikap yang proposional terhadap kemajemukan ini. Kemajemukan yang memiliki potensi konflik tinggi dan sentral yaitu isu yang berkenaan dengan kemajemukan beragama. Agama merupakan isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik di kalangan masyarakat (Agus Pahrudin,dkk, 2009: 157).

Kekaguman dunia internasional kini hanya tinggal kenangan, sebab perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama kini seringkali menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan bahkan gontok-gontokan yang meluluhlantahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini para pendahulu Indonesia. Sikap proposional dan saling menghargai terhadap kemajemukan kini telah luntur serta kesalehan sosial dalam kemajemukan bangsa pun telah memudar.

Sudah hampir 19 tahun reformasi berlalu, semangat reformasi secara implisit merupakan semangat perjuangan seluruh elemen masyarakat yang selama orde baru merasa tertindas dan cabut hak mereka sebagai warga negara yang memiliki kebebasan berpendapat, memeluk agama, memperoleh penghidupan yang layak, pendidikan dan lain-lain tanpa dibatasi warna kulit dan bahasa mereka. Reformasi tinggal menjadi sepenggal sejarah tidak bermakna ketika semangat pluralitas dan keberagama dicoreng oleh sebagian pihak yang tidak mengakui kebinekaan di negeri ini. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih kerap terjadi, tragedi kaum syi'ah di Sampang Madura beberapa tahun yang lalu, jama'ah ahmadiyah di berbagai kota Jawa Barat merupakan cermin bahwa pemerintah dan masyarakat belum mampu menerima Sunnatullah yang menciptakan di negeri ini, apalagi ketika pra dan pasca pemilihan kepala daerah (Jakarta khususnya) beberapa waktu yang lalu, tidak sedikit simpatisan masing-masing kubu calon kepala daerah saling menjatuhkan dengan mengatasnamakan ras, suku bahkan agama dan pelanggaran HAM dan hal tersebut masih terasa hingga hari ini.

Fenomena tersebut di atas menjadi media koreksi bagi setiap warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan, boleh jadi sistem pendidikan di negeri yang plural belum dapat memberikan pencerdasan bagi anak bangsa bahwa perbedaan adalah rahmat yang harus dipupuk dengan saling

menghargai satu sama lain. Pendidikan pun tidak boleh lagi terkesan diskriminatif, karena pendidikan harus diperoleh oleh setiap warga Negara sebagaimana amanah UUD 1945. Dengan demikian studi ini akan membahas secara deskriptif normatif dan psikologis yang merujuk kepada beberapa sumber tekstual tentang isu multikulturalisme dan gerakan perubahan dalam Islam terutama dalam bidang pendidikan.

## PEMBAHASAN

### Antara Multikultural dan Pluralitas Masyarakat

Multikulturalisme (R. Zando Zakaria dalam Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri, 2003: 23) seringkali diartikan sebagai pengakuan terhadap kelompok-kelompok kecil untuk menjalankan kehidupannya, baik yang berkaitan dengan urusan publik maupun privat. Secara etimologis, multikulturalisme sesungguhnya belum berumur lama. Istilah multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950-an di Canada.

Menurut Choirul Mahfud (2014: 75) akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, kata ini dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/faham). Hal ini diperkuat oleh buku *Longer Oxford Dictionary* istilah "*multiculturalism*" merupakan derivasi dari kata "*multicultural*". Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Canada, *Montreal Times* yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat "*multicultural* dan *multi-lingual*". Sebagai sebuah terminologi baru, "multikulturalisme" belum begitu banyak dipahami orang. Namun demikian, pemahaman tentang istilah ini dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan [*level*]. *Pertama*, pemahaman populer sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka memahami fenomena multikulturalisme sebagai semakin mudah ditemuinya restoran Cina,

Hoka-Hoka, Bento, Salero Bagindo, McDonald, Jet Kundo, kursus Yoga, *boutique* Versace di satu wilayah yang sebelum bersifat homogen. *Kedua*, pemahaman politis. Kelompok politisi memahami multikulturalisme sebagai memajemuknya masyarakat secara kultural yang menimbulkan berbagai persoalan sosial yang menuntut kebijakan-kebijakan tertentu [pengetatan imigrasi, pendataan, sampai program-program asimilasi]. *Ketiga*, pemahaman akademis. Pemahaman akademis tentang multikulturalisme mendasarkan diri pada perkembangan filsafat posmodernisme dan *cultural studies* yang menekankan prinsip paralogisme di atas monologisme, kemajemukan di atas kesatuan.

Semangat yang paling penting dari multikulturalisme adalah *living together as one society* [hidup bersama sebagai suatu masyarakat]. Ide ini muncul karena dorongan akan kenyataan bahwa dunia, sejak lima puluh tahun yang lalu bergerak menjadi dusun global [*global village*]. Dunia sekarang tidak lagi merupakan tempat dimana satu wilayah hanya dihuni oleh satu kelompok etnis, budaya, dan agama tertentu saja. Keragaman ini muncul dan menjadi *conditio sine qua non* pada sebuah masyarakat global. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang plural mesti harus menangkap konsep ini sebagai sebuah fenomena yang realistis. Menurut Nurul Asna "Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal". Kendatipun ada semangat provinsialisme akibat otonomi daerah tapi melestarikan sikap monokulturalisme bukanlah sikap yang bijak untuk saat sekarang (Nurul Asna, 2003).

Pandangan tentang keragaman dan heterogenitas serta bagaimana menyikapinya seringkali berbeda-beda. Di Amerika, misalnya, muncul serangkaian konsep tentang pluralitas yang berbeda-beda, mulai dari konsep *melting pot* sampai multikulturalisme. Konsep *melting pot* muncul seiring dengan kedatangan imigran

dari berbagai pelosok Eropa Barat dan Timur ke wilayah benua Amerika yang dikuasai oleh bangsa Anglo-Saxon. Konsep ini masih menunjukkan perspektif yang bersifat monokultur, karena acuan atau “cetakan budaya” yang dipakai untuk ‘melelehkan’ berbagai asal budaya tersebut mempunyai karakteristik yang secara umum diwarnai oleh kelompok berkulit putih, berorientasi budaya Anglo-Saxon, dan bernuansa Kristen Protestan, *White Anglo-Saxon Protestan* [WASP]. Pengalaman ini dapat diambil pelajaran bagi bangsa Indonesia yang pluralis. Sebagai misal, menurut Alwi Shihab (1998: 41), “masyarakat pluralisme agama adalah tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan”. Pluralis harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, bahkan orang-orang yang tanpa agama sekalipun.

Menurut Newt Gingrich, juru bicara Kongres Amerika, *melting pot* tidak cukup untuk menghadapi gempuran etnisisme. Dalam pandangannya, ketika orang datang ke Amerika, seharusnya mereka menanggalkan seluruh masa lalunya, kemudian mengenakan identitas baru, yaitu identitas Amerika. Namun, *pen-delet-an* [penghapusan] masa lalu sesuatu yang musykil. Bahkan orang yang mengaku paling modern sekalipun masih punya kenangan masa lalu [*collective memories*] tentang tanah leluhur mereka di Inggris dan Skotlandia. Padahal, mereka hijrah ke dunia baru itu lebih dari dua abad yang lampau.

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan demografi yang semakin memunculkan kenyataan pluralitas, imigran

dengan latar budaya di luar WASP mulai menuntut pengakuan atas kontribusi mereka dalam membentuk budaya Amerika. Maka muncullah konsep-konsep alternatif yang disebut dengan *Salad Bowl*, dan kemudian konsep *Cultural Pluralism* dengan pelopornya Horace Kallen (1970).

Konsep *Salad Bowl* mengakomodasi kontribusi berbagai macam budaya di luar WASP untuk memperkaya kebudayaan Amerika, tetapi semuanya tetap diletakkan dalam suatu kerangka budaya nasional yang dominan, yang disebut sebagai kebudayaan Amerika.

Sedang konsep *Cultural Pluralism* membedakan antara ruang publik yang homogen, tempat semua warga bersosialisasi dan berpartisipasi dalam politik, dan ruang privat yang penuh keragaman budaya berdasarkan latar belakang masing-masing warga. Pada realitasnya, ruang publik dan privat tidak sedemikian terpisah, dan kelompok minoritas dan perempuan menunjukkan bagaimana ruang publik yang netral tidak bisa diwarnai oleh bias budaya yang dominan.

Dari waktu ke waktu, tuntutan pengakuan akan kesetaraan dalam keragaman makin meningkat. Hal ini bisa ditelusuri dari gerakan masyarakat di Amerika untuk menuntut persamaan hak-hak sipil di tahun 1960-an. Diawali kelompok kulit hitam yang telah dibebaskan dari perbudakan sehabis perang saudara, tetapi tak kunjung mendapatkan kesetaraan hak secara sosial dan politik, gerakan masyarakat sipil diikuti oleh kaum perempuan di tahun 1970-an dan “kaum berwarna lainnya”. Pada tahun 1980-an, istilah multikulturalisme mulai diperkenalkan untuk menggugat dominasi budaya WASP dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bahasa, sejarah, dan ekspresi budaya di media massa dan kesusasteraan.

Dipelopori sejumlah intelektual, sistem pendidikan dan kurikulum dievaluasi untuk memberikan ruang bagi pengalaman

dan ekspresi keberagaman; sejarah dituliskan kembali untuk mengakui kenyataan keragaman dalam masyarakat. Dalam bidang kesusasteraan dan kesenian, penulis dan seniman dari berbagai latar belakang membahas permasalahan lintas-budaya yang dialami negeri asal maupun di Amerika.

Secara faktual, Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Realitas ini membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi demikian, pada level pendidikan perlu kiranya dikembangkan sebuah pendidikan berparadigma multikulturalisme. Mengapa pendidikan? Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia seringkali kurang memperhatikan terhadap persoalan ini, padahal disadari betul bahwa pendidikan merupakan ladang persemaian kesadaran multikulturalisme. Kesadaran pluralis tidak dapat hanya sekadar dibicarakan tetapi harus dipraktekkan. Hal ini yang diharapkan oleh Mark Juergensmeyer (2002: 4-5) penulis buku *Terror in The Mind of God*, bahwa kesadaran masyarakat pluralis diharapkan dapat membentuk masyarakat yang toleran dan anti kekerasan, baik kekerasan dalam arti fisik maupun non-fisik. Hal ini dilator belakang oleh pengalaman pahit Juergensmeyer seperti tergambar pada ungkapannya “kejarnya kekerasan agama telah sampai di rumah saya pada tahun 1998, ketika saya menerima kabar bahwa sebuah bom mobil meledak di sekitar Belfast, yang saya kunjungi sehari sebelumnya.”

Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standard untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan. Beberapa keuntungan dengan pendekatan pendidikan model ini adalah: *pertama*, setiap individu tidak lagi terbatas dengan pandangan yang menyamakan pendidikan [*education*] dengan persekolahan [*schooling*] atau pendidikan

multikultural dengan program-program sekolah formal.

Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan akan membebaskan pendidik dari asumsi mereka bahwa tanggungjawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan peserta didik semata-mata berada di tangan mereka, melainkan tanggung jawab semua pihak karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal dan luar sekolah. Di sinilah arti penting menerapkan sikap kesetaraan dalam bermasyarakat seperti yang disarankan oleh Edward Said (1977), penulis buku *Orientalism*, sebagai kritik atas sikap kaum orientalisme yang arogan terhadap masyarakat Timur. Kritik Edward Said ini mendapat sambutan yang cukup luas dan bukunya yang berjudul *Orientalism* mendapat penghargaan masyarakat akademik yang luas karena kekritisannya.

*Kedua*, setiap individu tidak lagi terbatas pada pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*. Oleh karena individu-individu atau peserta didik memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka setiap individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Dalam konteks pendidikan multikultural, apabila pendekatan ini dipahami dan diadopsi oleh para penyusun program-program pendidikan multikultural, akan melenyapkan kecenderungan memandang peserta didik secara *stereotype* menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru, biasanya membutuhkan interaksi intensif

dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahan dan memperluas solidaritas kelompok etnik adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

*Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang di sandang individu dan identitas sosial primer dalam kelompok etnik tertentu.

*Kelima*, kemungkinan bahwa pendidikan [baik di sekolah maupun luar sekolah] meningkatkan kesadaran mengenai kompetensi dalam beberapa kebudayaan akan menjauhkan individu dari konsep dwibudaya [*bicultural*] atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Karena dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan "multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia". Kesadaran ini mengandung potensi pendidikan multikultural untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri para peserta didik.

### **Gagasan Kurikulum Berbasis Multikultural**

Ketika isu kurikulum berbasis karakter mulai disosialisasikan oleh lembaga yang berkompeten di Indonesia, maka mulailah bergema semangat menerapkan kurikulum ini di lembaga masing-masing

yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Sejak inilah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuntut para praktisi pendidikan untuk melakukan reorientasi model kurikulum dan pembelajaran yang selama ini dilakukan. Hal ini dikarenakan model kurikulum dan pembelajaran selama ini jauh dari harapan dan hanya berorientasi pada hasil yang bersifat kognitif dan mengabaikan perubahan sikap siswa termasuk tentang arti penting menghargai perbedaan.

Darmaningtyas (2004) mengatakan bahwa "pendidikan kita tidak menciptakan peserta didik menjadi cerdas dan kreatif tapi justru sebaliknya." Di samping sarat dengan beban, kurikulum konvensional juga dianggap tidak peka dengan kenyataan multikultural. Akibatnya tujuan luhur pendidikan yang terjemakan dalam GBPP maupun kurikulum *mandeg* dan hampir-hampir kehilangan orientasi kebudayaan. Lihatlah kasus tawuran anak sekolah yang kian meningkat, pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia sekolah, kekerasan, pemerkosaan, pencopetan dan lain-lain. Tidak hanya itu, tidak kalah dengan peserta didik, para pendidik pun seringkali melakukan hal-hal yang tak senonoh. Seringkali melakukan hal-hal yang amoral, melakukan tindak kekerasan bahkan tak jarang yang berakibat pada hilangnya nyawa peserta didik seperti kasus di salah satu SD di Jakarta dan di Bukit Tinggi Sum-Bar.

Dalam hal ini, harus diakui, bahwa ada yang salah dengan pendidikan di negeri ini. Ada yang tidak beres dengan kurikulum dan program pembelajarannya. Logikanya adalah, bagaimana mungkin anak melakukan kejahatan atau tindak amoral ketika di sekolah diajarkan pendidikan agama dan pendidikan moral? Secara normatif hal ini tidak masuk akal, tapi itulah kenyataan yang tak bisa ditampik. Pesan-pesan yang disampaikan, baik melalui pendidikan agama maupun pendidikan moral, menyublim begitu saja dan tidak mampu dicerna dalam realitas empirik oleh peserta didik. Inilah yang diherankan oleh

Munir Mulkan (2001) dalam pengantarnya pada buku Th. Sumantana, karena diyakini oleh para pemeluk agama-agama di dunia bahwa “fungsi agama yang dipeluknya itu ialah memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan sesudah hari kematian.”

Menurut hemat penulis, dari sinilah urgensi dimunculkannya Kurikulum Berbasis Karakter. Kalau selama ini pengajaran banyak dilakukan dengan hafalan dan *drilling* saja, maka kurikulum pada saat ini (apapun namanya) menekankan adanya kompetensi afeksi dan psikomotor peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya tahu tapi juga mampu melakukannya dalam tindakan nyata. Peserta didik diharapkan benar-benar merasakan bagaimana nilai-nilai yang selama ini diajarkan berguna dan membentuk perilaku. Kurikulum ini, menurut Hari Suderajat (2004: 38), akan dapat membuat perubahan ke arah pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Kalau Kurikulum 2013 hendak merombak kurikulum yang berorientasi hanya pada aspek kognisi kepada kurikulum yang berorientasikan kepada kompetensi, maka pada level kebudayaan [*culture*] sesungguhnya dibutuhkan sebuah rumusan kurikulum yang berorientasi pada pemahaman kebudayaan. Hal ini menyangkut kondisi nyata Indonesia yang terdiri dari beragam kultur, bahasa, suku, agama dan sebagainya. Kompetensi ini diharapkan mampu mengelola konflik yang bersumber dari adanya perbedaan kebudayaan ini. Kondisi ini, hemat Sumartana (2001: 81) menjadi realitas yang secara arif harus direspons. Hal ini dirasakan semakin mendesak karena dalam beberapa tahun terakhir konflik antar etnik semakin sering mencuat. Maka, pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia menghadapi realitas ini?

Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, negara

tidak hanya mengembangkan kebudayaan nasional tunggal. Satu hal yang penting dicatat, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat dan negara-bangsa [*nation state*] tidaklah berarti relativisme kultural, ketercerabutan, destruksi sosial atau konflik berkepanjangan. Sebab, pada saat yang sama juga terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama. Menurut Faisal Ismail (2004), upaya memelihara kesatuan bangsa menuntut perhatian dan kepedulian dari segenap komponen bangsa. Hal ini sangat terasa ketika terjadi konflik horizontal yang bernuansa etnik dan keagamaan.

Dengan demikian, mengembangkan kompetensi kebudayaan merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kompetensi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman lintas budaya, membiasakan budaya saling menghormati antar suku, agama maupun adat yang berbeda. Bukan hanya saling menerima keberadaan tapi juga saling menghadirkan. Karena seringkali relasi yang terbangun dalam masyarakat multikultural adalah pola kehidupan yang saling acuh tak acuh. Tampaknya, dalam kondisi demikian masyarakat pluralis sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hidupnya berbagai potensi bangsa. Karena hanya dalam sikap masyarakat pluralisme sajalah kondisi itu dapat diwujudkan. Lagi pula pluralisme, menurut Paul Procter (ed., 1980), harus dipahami sebagai “prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari berbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama”.

Masyarakat pluralis mengakui keberadaan [*being*] yang lain namun tidak eksistensinya. Sehingga pola kehidupannya tetap saja hanya bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kultur yang sama. Kompetensi kebudayaan ini juga untuk



mengajarkan kepada para peserta didik agar dapat hidup saling berdampingan dengan yang lain. Karena sesungguhnya multikulturalisme adalah pengalaman normal manusia. Kautsar Azhari Noor dalam Sumartana (2001: 240) menyarankan agar pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya dan sekaligus dapat memberikan sumbangan untuk menumbuhkan sikap yang menghargai pluralisme dan pluralitas apabila ia: *pertama* mampu melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada peserta didik; *kedua* mampu menjadikan pendidikan agama sebagai suatu program pendidikan yang dirasakan penting dalam sistem pendidikan nasional; *ketiga* mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar-agama, seperti nilai-nilai yang disebut di atas; dan *keempat* memberikan perhatian yang memadai untuk mempelajari agama-agama lain.

Berdasarkan realitas di atas, maka perlu ada penyikapan yang lebih kondusif. Menyikapi realitas multikultural ini, Paul Suparno (2003), (Dosen Universitas Sanata Dharma) mengatakan bahwa untuk menjadikan orang yang bermacam-macam tadi dapat bersatu membangun negara secara kuat, terdapat dua model. *Pertama*, dengan menyeragamkan dan menghilangkan perbedaan yang ada baik dari segi budaya, agama, nilai, etnik dan lain-lain. Mereka yang berbeda-beda itu dipaksa disatukan dengan aturan ketat dan penyeragaman. Tidak diterima adanya perbedaan, itulah yang dilakukan Republik Rakyat Cina, Uni Soviet dan Yugoslavia zaman dahulu. Hasilnya adalah bubar, karena perbedaan tidak dapat dihilangkan. Menghilangkan perbedaan yang memang sudah ada sejak lahir adalah suatu pemaksaan yang melawan Hak Azasi Manusia [HAM], maka tidak dapat bertahan lama.

Model *kedua*, justeru menerima perbedaan, mengakuinya dan menghargainya. Dengan saling menerima, orang yang berbeda itu bahkan dapat saling melengkapi, saling membantu lebih kaya.

Dalam model kedua, HAM setiap orang diakui dan kekhasan setiap kelompok diakui, bahkan dikembangkan. Dalam model kedua diperlukan semangat multikultural. Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Apalagi karena dalam diri seseorang ada kecenderungan untuk mengharapkan orang lain menjadi seperti dirinya.

Sikap saling menerima dan menghargai akan cepat berkembang bila dilatihkan dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Leo Sutrisno dalam Sumartana (2001: 218) memang benar untuk menerima perbedaan dan menanamkan sikap kemandirian, peserta didik sejak dini dilatih untuk berfikir argumentatif. Apabila peserta didik di-budidaya-kan dalam kerangka berpikir "rasional dan kritis" sejak hari pertama menginjakkan kaki di sekolah niscaya mereka akan mampu mengembangkan berpikir yang mandiri. Mereka akan berpikir argumentatif untuk memilih yang terbaik (yang paling jelas, paling masuk akal, paling lengkap, dan paling banyak manfaatnya. Mereka tidak lagi mencari yang benar atau berpura-pura benar agar tidak berada dalam posisi terancam.

Dengan pendidikan, sikap penghargaan terhadap perbedaan yang direncanakan secara baik, generasi muda dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain bahkan melatihnya dalam hidup sehingga sewaktu mereka dewasa sudah mempunyai sikap itu. Di sini pemerintah dan tiap sekolah perlu memikirkan model dan bentuk pola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan program pemerintah dalam waktu yang panjang.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi kebudayaan ini, maka diperlukan kerjasama antar berbagai komponen dalam pendidikan, antara lain: kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran

guru. Isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Oleh karenanya, sistem pendidikan nasional harus melakukan reorientasi dan reformasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang cukup pesat melalui dua isu besar, yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya melakukan reformasi pendidikan disarankan oleh Suyanto dan Djihad Hisyam (2000: 2):

“Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejak jalannya sendiri, khususnya memasuki masa millenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri, refleksi praksis pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar di kemudian hari kita tidak lupa dengan wajah diri kita sendiri”.

Sebagai tamsil adalah, dalam semua bidang pelajaran, dimasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam tiap budaya, ilmu itu dikembangkan. Contoh-contoh ilmuwan dan hasil teknologi, perlu diambil dari berbagai budaya dan latar belakang termasuk gender. Kesamaan dan perbedaan antarbudaya perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk semakin mengerti nilai budaya lain, menerima dan menghargainya. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, cara hidup, bukan hanya dijelaskan dari budayanya sendiri, tetapi juga yang lain. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan seorang guru yang memiliki pemikiran yang progresif, mampu mengubah pola pembelajaran yang hanya mengutamakan kemampuan verbalistik. Menurut Paulo Freire, tidak mungkin jika kita ingin mengubah sistem pendidikan yang lebih progresif tetapi tidak memberikan peluang kepada guru untuk

melakukan perubahan dirinya. Lebih lanjut Freire (2003: 13) menyatakan:

“Yang tidak mungkin, bagi saya, adalah memberi pidato kepada kaum tertindas, tetapi pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa kaum tertindas ini tidak memiliki cukup kedewasaan untuk mengatur diri. Hal ini mirip dengan seseorang yang berbicara tentang sekolah yang demokratis sambil mengikat tangan guru-gurunya (karena mereka tidak memiliki kompetensi) dan mengajarkan “paket-paket” yang berisi pengetahuan “kepakaran” kita. Tidaklah mungkin menegasikan praktik demi sebuah teori yang dengan cara tertentu, tidak lagi menjadi teori karena telah berubah menjadi verbalisme atau intelektualisme semata”.

Model pembelajaran dalam kelas pun perlu diwarnai multikultural, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Penyajian bahan, termasuk matematika, dalam memberi contoh, guru perlu memilih yang beraneka ragam nilai. Buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain dan penghargaan gender, demikian Paul Suparno (2003). Dalam hal ini, seorang guru mesti mampu menerangkan materi dengan jelas dan semaksimal mungkin menggunakan bukan sekadar kata-kata atau memosisikan satu kelompok atau kultur secara diskriminatif.

Suasana sekolah juga mempunyai posisi dan peran yang amat penting dalam penanaman nilai multibudaya. Sekolah harus dibangun dengan suasana yang menunjang penghargaan budaya lain. Relasi guru, karyawan, siswa yang berbeda budaya diatur dengan baik, ada saling menghargai. Anak dari kelompok lain tidak ditolak tetapi dihargai. Bahkan yang tidak kalah penting, terlebih di tingkat SD-SMU, dekorasi sekolah perlu diatur dengan nuansa multikultural. Meski sekolah itu di Pulau Jawa, hiasan dan dekorasi ruang dibuat beraneka ragam budaya suku-suku yang ada

di Indonesia, misalnya, sehingga siswa mengerti nilai lain.

Peran guru dalam pendidikan multikultural juga amat penting. Guru harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi dan kegiatan sekolah secara multikultur, di mana setiap siswa dari berbagai suku, gender, ras, kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu. Kenyataan ini berawal dari sebuah kajian dari kelompok lingkaran Roma [*The Club of Roma*] yang merasakan adanya kegalauan kondisi dunia kontemporer. Kondisi kontemporer merupakan suatu kondisi yang harus dilakukan upaya penyadaran akan realitas kemajemukan. Bila tidak diatasi secara arif, kondisi ini akan membuat sesuatu yang mengerikan. Lihat. Mukti Ali, 1998: 3)

Guru perlu menekankan *diversity* dalam pembelajaran, antara lain dengan (1) mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa; dan (2) mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Dalam pengelompokan siswa di kelas maupun dalam kegiatan di luar kelas guru diharapkan memang melakukan keanekaan itu.

### KESIMPULAN

Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Satu hal yang penting dicatat, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Melalui perubahan pola pikir bidang pendidikan yang selama ini terkesan diskriminatif dan dikotomi menjadi pendidikan berbasis multikultural perlu didukung karena pendidikan multikultural bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan “multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia.

Pada level pendidikan perlu kiranya dikembangkan sebuah kurikulum berparadigma multikulturalisme (apapun namanya). Hal ini menjadi penting disadari bahwa pendidikan merupakan ladang persemaian kesadaran multikulturalisme. Kesadaran pluralis tidak dapat hanya sekedar dibicarakan tetapi harus dipraktekkan. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghantarkan anak bangsa menyadari bahwa perbedaan adalah rahmat tuhan dan dapat mengembangkan kompetensi mereka untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan yang lebih bermartabat dalam bingkai multikultural.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Ali, “*Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer*”, dalam A. Mukti Ali [et.al], *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998)
- Abdul Munir Mul Khan, “*Dilema Manusia dengan Diri dan Tuhan*”, Th. Sumartana [et.al], *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001)
- Agus Pahrudin, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Balai Penelitian dan pengembangan Agama jilid 1 2009).
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Amirullah Syarbini, *Membudayakan Toleransi Antar Umat Beragama*, (Banten: LPTQ, 2007)
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004).
- Edward Said, *Orientalism*, (New York: Vintage Books A Division of Random Haouse, 1977)

- Faisal Ismail, "Kata Pengantar", dalam M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004),
- Hari Suderajat, *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi [KBK]*, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004)
- Kautsar Azhari Noer, "Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakeberdayaan Sistem Pendidikan Agama", dalam Th. Sumartana [et.al.], *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001)
- Leo Sutrisno, "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme", dalam Th. Sumartana [et.al.], *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001),
- Mark Juergenmeyer, *Terror in The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, dalam versi Indonesia diberi judul *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002)
- Paulo Feire, *Pendidikan Masyarakat Kota*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- R. Zando Zakaria dalam Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri (ed.), *Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan*, (Jakarta: Safiria Insania Press dan Magister Studi Islam Universitas Indonesia, 2003)
- Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002) dalam Agus Moh. Najib, Ahmad Baidowi, Zainudin, *Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap UIN Yogyakarta, LAIN Banjarmasin, dan STAIN Surakarta)*
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2000)
- Th. Sumartana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang Hubungan Antar-Agama di Indonesia", dalam Th. Sumartana [et.al.], *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001)
- Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010).